

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Survei Bank Dunia (2010) menunjukkan bahwa 49 persen rumah tangga Indonesia yang mempunyai akses terhadap lembaga keuangan formal. Hal ini juga ditemukan Bank Indonesia dalam Survei Neraca Rumah Tangga (2011), menunjukkan persentase rumah tangga yang menabung di lembaga keuangan formal dan non lembaga keuangan sebesar 48 persen. Demikian masyarakat yang tidak memiliki tabungan baik di bank maupun di lembaga keuangan non bank masih relatif sangat tinggi yaitu 52%. Survei-survei tersebut saling menguatkan dan mendukung bahwa akses keuangan masyarakat Indonesia ke lembaga keuangan formal dan non formal masih relatif rendah sehingga penduduk Indonesia yang memiliki akses yang terbatas terhadap sistem jasa keuangan masih perlu ditingkatkan (Bank Indonesia, 2014, hal. 4).

Suatu keberhasilan pembangunan ditandai dengan terciptanya sistem keuangan yang stabil dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Institusi keuangan memainkan peran penting melalui fungsi intermediasinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan. Dengan demikian, industri keuangan yang berkembang sangat pesat belum tentu disertai dengan akses keuangan yang memadai. Syarat penting keterlibatan masyarakat luas dalam perekonomian ialah akses layanan. Kesempatan masyarakat untuk dapat

mengakses dan menggunakan jasa keuangan, mencerminkan tingkat keuangan inklusif dalam ekonomi tersebut (Umar, 2017, hal. 100).

Keuangan inklusif adalah upaya yang bertujuan meniadakan berbagai bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Keuangan inklusif menjadi strategi nasional yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan (Bank Indonesia, 2014, hal. 4).

Strategi pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan merupakan bagian keuangan inklusif. Pusat dari strategi ini ialah pada masyarakat yang mengalami hambatan untuk mengakses layanan keuangan. Masyarakat atau kelompok dengan kebutuhan terbesar atau belum dipenuhi atas layanan keuangan yaitu 3 penduduk (orang miskin berpendapatan rendah, orang miskin bekerja. Miskin produktif dan kategori orang hampir miskin dan 3 lintas kategori (pekerja migran, perempuan dan penduduk terpencil) (Bank Indonesia, 2014, hal. 8).

Program ini di bentuk untuk mendukung pemerintah dalam mengurangi persentase kemiskinan serta pembangunan ekonomi. Tujuan dari strategi ini ialah menjadikan keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pembangunan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan. Keuangan yang inklusif dapat memberikan akses terhadap jasa keuangan yang lebih luas bagi setiap penduduk, terutama bagi kelompok yang memiliki keterbatasan akses

terhadap layanan keuangan. Dengan mengakses layanan keuangan masyarakat miskin memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi hidupnya menjadi lebih sejahtera. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan kesenjangan pendapatan dapat berkurang (Bintan Badriatul Ummah, 2014, hal. 2).

Inklusi keuangan berperan dalam pengurangan kemiskinan melalui dua cara yang saling berhubungan. Pertama, inklusi keuangan membantu mengembangkan industri dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kedua, inklusi keuangan menyediakan layanan keuangan yang memadai, sehingga memperbaiki kualitas hidup penduduk (Askito, 2018, hal. 21).

Upaya dalam meningkatkan inklusi keuangan tidak hanya sebatas pengembangan produk dan layanan jasa keuangan tetapi juga meliputi empat elemen inklusi lainnya yaitu perluasan akses keuangan, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan, pengguna produk dan layanan jasa keuangan maupun kualitas produk dan layanan jasa keuangan itu sendiri (OJK, hal. 20).

Mewujudkan program keuangan inklusif yang berkesinambungan diperlukan koordinasi antara Bank Indonesia dengan kementerian dan insitusi terkait dalam rangka pengembangan, penetapan evaluasi program. Dengan kordinasi yang baik diharapkan tujuan peningkatan akses masyarakat kepada layanan keuangan dapat tercapai (Bank Indonesia, 2014, hal. 4).

Untuk mewujudkan inklusi keuangan tentunya diperlukan sebuah lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Industri keuangan syariah dapat menjadi industri keuangan yang inklusif dengan menysasar potensi besar pengelolaan dan pemanfaatan sistem keuangan syariah secara ekonomi makro.

Industri keuangan syariah yang dimaksud adalah lembaga-lembaga yang menyediakan jasa-jasa keuangan syariah yang telah berkembang di sektor perbankan, non-perbankan menjadi instrumen potensial pendukung pertumbuhan ekonomi inklusif

Lembaga keuangan syariah di Indonesia telah berkembang lebih dari dua dekade sejak beroperasinya Bank Muamalat Indonesia, sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Begitu pula dengan perkembangan lembaga keuangan syariah di Kalimantan Selatan diawali dengan hadirnya Bank Kalsel Syariah pada tanggal 13 agustus 2004. Perkembangan keuangan syariah telah membuahkan berbagai prestasi, dari makin banyaknya produk dan layanan, hingga berkembangnya infrastruktur yang mendukung keuangan syariah

Dalam pengembangan keuangan syariah ini adalah bahwa lembaga keuangan syariah harus dapat menjadi lembaga keuangan yang inklusif. lembaga keuangan syariah harus dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam skala kecil dan menengah hingga skala pembiayaan yang besar untuk menunjang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan itu maka kemudahan akses masyarakat terhadap produk, kualitas pelayanan, serta infrastruktur di lembaga keuangan syariah juga ditingkatkan. Demikian, lembaga keuangan syariah dapat berperan secara signifikan dalam menyejahterakan masyarakat (OJK, 2019, hal. 3).

Pengentasan rakyat dari kemiskinan, pemerataan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi membutuhkan ketersediaan layanan keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Itulah penyebab sektor keuangan tidak hanya menjadi sesuatu yang eksklusif, tapi harus inklusif. Peran sektor jasa keuangan dalam meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan ekonomi daerah, dan penguatan sektor ekonomi. Sektor-sektor jasa keuangan baik perbankan, pasar modal, maupun lembaga keuangan nonbank untuk terus melakukan terobosan bagi penyaluran pendanaan kepada UMKM, usaha pemula/rintisan (*start-up business*), dan sektor prioritas (Indonesia, Media).

Jumlah penduduk Kalimantan Selatan terus meningkat. Pada tahun 2018, jumlah penduduk Kalimantan Selatan menurut hasil proyeksi SP2010 sekitar 4,18 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk selama periode 2017-2018 sebesar 1,53 persen. Pada tahun 2018, penduduk Kalimantan Selatan bertambah sekitar 62 ribu jiwa dibandingkan pada tahun sebelumnya. Secara jumlah, penduduk Kalimantan Selatan terus bertambah, namun laju pertumbuhan penduduk di Kalimantan Selatan menunjukkan tren yang terus menurun. Pada periode 2015 penduduk Kalimantan Selatan tumbuh sebesar 1,71 persen, kemudian terus menurun hingga 1,53 pada periode 2017-2018.

Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan dalam rentang waktu Maret 2009 hingga September 2018 cukup berfluktuatif. Secara jumlah hingga September 2018, jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan mencapai 195,01 ribu jiwa. Pada umumnya, dinamika jumlah penduduk miskin juga sejalan dengan tingkat kemiskinan di suatu daerah yang dicerminkan dari persentase penduduk miskin. Hal ini berlaku pada perkembangan jumlah penduduk miskin

dan tingkat kemiskinan Kalimantan Selatan. Kondisi terkini kemiskinan per September 2018, angka kemiskinan Kalimantan Selatan sebesar 4,65 persen, sedikit meningkat dibandingkan Maret 2018 yang sebesar 4,54 persen. Hal tersebut juga ditunjukkan dari sisi nominal, jumlah penduduk miskin naik dari 189,03 ribu jiwa menjadi 195,01 ribu jiwa (BPS, 2018).

Berdasarkan latar belakang ialah bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Kemiskinan di Kalimantan Selatan selama Periode 2015-2019. Inklusi keuangan syariah di harapkan dapat mengurangi kemiskinan di Kalimantan Selatan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Inklusi Keuangan Syariah berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan di Kalimantan Selatan
2. Apakah Inklusi Keuangan Syariah berpengaruh secara parsial terhadap kemiskinan di Kalimantan Selatan.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh simultan Keuangan Inklusif Syariah terhadap Kemiskinan di Kalimantan selatan.
2. Mengetahui pengaruh parsial Keuangan Inklusif Syariah terhadap Kemiskinan di Kalimantan selatan.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan suatu kesempatan bagi penulis untuk menambah pengetahuan tentang keuangan inklusif syariah. Penelitian ini juga memberikan kesempatan bagi penulis untuk mempraktekkan pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama kuliah.

2. Bagi pihak lain

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau referensi atau sebagai pembandingan bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu langkah untuk menghindari kesalahpahaman dalam memaknai kalimat dan memperjelas maksud dari penelitian ini maka perlu adanya definisi operasional untuk mempertegas dan terperinci maksud dari judul “Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Kemiskinan di Kalimantan Selatan Pada Tahun 2015-2019”.

Judul tersebut mengarah kepada dampak Inklusi Keuangan Syariah terhadap kemiskinan di Kalimantan Selatan. Inklusi keuangan syariah ialah meniadakan segala bentuk hambatan dalam mengakses jasa keuangan syariah melalui lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah meliputi perbankan, industri keuangan non bank syariah (IKNB Syariah) .

Indikator dari inklusi keuangan adalah akses, penggunaan, dan kualitas.

1. Akses

Akses merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal, sehingga dapat dilihat potensi terjadinya hambatan untuk membuka dan mempergunakan rekening bank, seperti biaya atau keterjangkauan fisik layanan jasa keuangan. Indikator ini meliputi jumlah kantor Bank Syariah, baik Unit Usaha Syariah, BPRS, ATM, dan Asuransi Syariah.

2. Penggunaan

Penggunaan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan, antara lain terkait keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan. Indikator ini menggunakan data jumlah rekening Dana Pihak Ketiga (Deposito, Tabungan dan Giro)

3. Kualitas

Kualitas merupakan indikator yang dapat didekati salah satunya melalui pengukuran literasi. Meliputi data indeks pembangunan manusia dari indikator pendidikan.

F. Anggapan Dasar atau Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji melalui penelitian. Hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. H_0 : Tidak ada pengaruh signifikan secara simultan, inklusi keuangan yang terdiri dari variabel akses, penggunaan dan kualitas terhadap kemiskinan di Kalimantan Selatan.

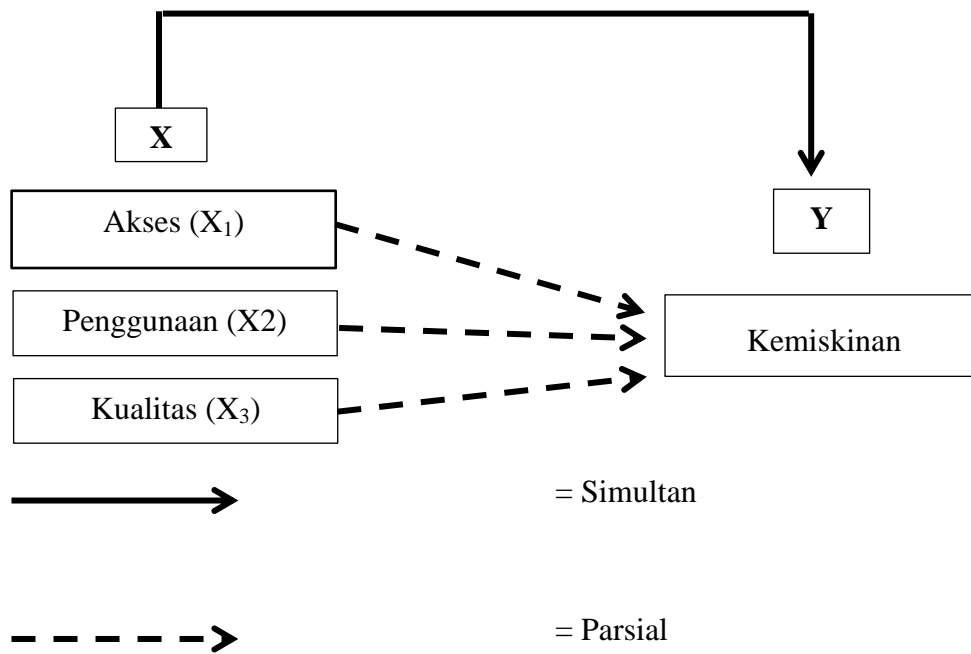
H_1 : Terdapat pengaruh signifikan secara simultan, inklusi keuangan yang terdiri dari variabel akses, penggunaan dan kualitas terhadap kemiskinan di Kalimantan Selatan.

2. H_0 : Tidak ada pengaruh signifikan secara parsial, inklusi keuangan yang terdiri dari variabel akses, penggunaan dan kualitas terhadap kemiskinan di Kalimantan Selatan

H_1 : Terdapat pengaruh signifikan secara parsial, inklusi keuangan yang terdiri dari variabel akses, penggunaan dan kualitas terhadap kemiskinan di Kalimantan Selatan

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir di gambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. 1 Kerangka berpikir

H. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

NO	PENELIT I	JUDUL	JENIS PENELITIAN DAN VARIABEL	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN
1	I Made Sanjaya (2015)	INKLUSI KEUANGAN DAN PERTUMBUHAN INKLUSIF ANALISIS ANTAR PROVINSI DI INDONESIA	<p>Jenis penelitian kuantitatif Variabel bebas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akses 2. Availabilitas 3. Penggunaan <p>Variabel terikat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Inklusif 	<p>Bahwa kelompok masyarakat miskin cukup terbatas dalam memanfaatkan layanan jasa sektor keuangan. Lebih jauh lagi, penelitian ini menggunakan fungsi kesempatan sosial (social opportunity function) untuk mengukur pertumbuhan inklusif, dan menemukan korelasi positif dengan inklusi keuangan.</p>	<p>Persamaan : Menggunakan variabel bebas dari indikator inklusi keuangan</p> <p>Perbedaan : Penelitian ini menggunakan metode penelitian reliabilitas, uji analisis regresi liner berganda, uji F dan Uji T. Variabel terikat yang digunakan adalah kemiskinan. Sedangkan penelitian I made Sanjaya (2015) menggunakan variabel terikat pertumbuhan inklusif dan data perbandingan 33 provinsi di Indonesia</p>

2	Bintan Badriatul Ummah (2015)	ANALISIS INKLUSI KEUANGAN DAN PEERATAAN PENDAPATAN DI INDONESIA	<p>Variabel bebas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetrasi perbankan. 2. Ketersediaan jasa perbankan. 3. Penggunaan jasa perbankan. 	<p>Hampir seluruh provinsi di Indonesia memiliki tingkat inklusi keuangan rendah, kecuali Jakarta. Dilihat dari pendekatan sosial ekonomi, ukuran perekonomian dan ketimpangan pendapatan mempengaruhi positif tingkat inklusi keuangan. Berbeda dari hipotesis penelitian, ketimpangan pendapatan yang semakin lebar mengakibatkan inklusi keuangan di Indonesia semakin tinggi. Ketimpangan pendapatan dengan inklusi keuangan memiliki hubungan satu arah dimana ketimpangan pendapatan mempengaruhi inklusi keuangan di Indonesia tetapi tidak sebaliknya. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, seperti <i>money mobile</i>, dapat mengurangi hambatan geografis sehingga meningkatkan inklusi keuangan.</p>	<p>Perbedaan : penelitian ini menggunakan variabel bebas indeks inklusi keuangan (akses, penggunaan dan kualitas). Sedangkan penelitian Bintan Badriatul Ummah (2015) variabel bebas yg digunakan adalah indeks inklusi keuangan dari perkembangan sarma yaitu penetrasi perbankan, ketersediaan jasa perbankan, dan penggunaan jaa perbankan</p>
3	Lia Nazliana Nasution (2016)	KEUANGAN INKLUSIF DAN PERTUMBUH AN EKONOMI SUMUT	<p>Variabel Bebas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kantor cabang dan produk. 2. PDRB 	<p>Penelitian ini bertujuan untuk melihat korelasi diantara faktor-faktor terkait inklusif keuangan dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara Periode 2008 sampai dengan 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya jumlah tabungan dengan jumlah kantor cabang bank, jumlah pinjaman (investasi, konsumsi, dan modal kerja), dan PDRB</p>	<p>Persamaan : Mengukur Inklusi Keuangan</p> <p>Perbedaan : Penelitian Lina Naliana Nasution (2016), melihat hubungan terkait inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel</p>

Variabel terikat : yang memiliki hubungan korelasi sangat kuat dan signifikan. Sedangkan jumlah tabungan dengan jumlah penyaluran kredit UMKM dan jumlah angkatan kerja memiliki hubungan korelasi yang rendah dan tidak signifikan.

1. Jumlah penduduk

2. Jumlah angkatan kerja

yang digunakan adalah jumlah kantor Cabang dan produk, PDRB, jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja. Sementara penelitian ini Sementara penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh inklusi keuangan terhadap kemiskinan di Kalimantan Selatan

4 Lina Marlina (2016) PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KEUANGAN INKLUSIF BAGI UMKM TASIKMALAYA

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah cukup banyak upaya yang dilakukan oleh LKS dalam mengimplementasikan keuangan inklusif bagi pelaku UMKM, hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa produk, program, pembiayaan yang ditujukan buat para pelaku UMKM yang ada di Tasikmalaya.

Persamaan : Objek penelitian yaitu Lembaga Keuangan Syariah.

Perbedaan : Penelitian Lina Marlina (2016), bertujuan untuk melihat Lembaga Keuangan Syariah penerapan Keuangan yang Inklusif bagi pelaku UMKM. Sementara penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh inklusi keuangan terhadap kemiskinan di Kalimantan Selatan

5	Azwar Iskandar Umar (2017)	INDEKS INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA	Variabel bebas : 1. Akses 2. Availibilitas 3. Penggunaan Variabel terikat : 1. Kesejahteraan	<p>Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia masuk kategori ISFI rendah selama periode penelitian. Temuan ini bermakna bahwa kelompok masyarakat tidak sepenuhnya menggunakan jasa keuangan formal , khususnya sebagai sumber keuangan daan pembiayaan utama. Dalam mengukur inklusifitas keuangan syariah pada dimensi pengukuran availabilitas, penelitian ini hanya menggunakan data jumlah Bank Pembiayaan Syariah pada 33 provinsi di Indonesia mengingat keterbatasan data yang dapat diperoleh.</p>	<p>Persamaan :</p> <p>Variabel bebas menggunakan indikator inklusi keuangan yaitu akses, avaiibilitas atau kualitas dan penggunaan.</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Variabel terikat penelitian Azwar Iskandar Umar (2017) ialah kesejahteraan dengan data 33 provinsi di Indonesia. Menggunakan metode analisis korelasi (hubungan). Sedangkan, Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dan metode penelitian reliabilitas, uji analisis regresi liner berganda, uji F dan Uji T. Variabel terikat yang digunakan adalah kemiskinan.</p>
---	-------------------------------------	--	---	--	--

- 6 Edi Susilo MENGENTAS
(2015) KAN
 KEMISKINAN
 DAN
 KEBODOHAN
 UMMAT
 MELALUI
- INKLUSI
 KEUANGAN
 SYARIAH
 (*SHARIA
 FINANCIAL
 INCLUSION*)
- Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan umat yang sebagian besar hidup melalui UMKM selama ini tersekat oleh sebuah hal mendasar dari dunia perbankan yaitu —bankable, karena perbankan harus menjalankan azas kehati-hatian (*prudential banking*) dalam melepas kredit pada nasabahnya. UMKM yang secara umum tidak bankable, mengalami kesulitan dalam mengakses kredit/pembiayaan dan jasa layanan lainnya dari perbankan. Maka sebuah pola harus dibangun untuk menghapus sekat antara dunia perbankan yang menerapkan *prudential banking* dengan dunia UMKM yang membutuhkan suntikan permodalan. Penghapusan sekat itu dapat dijumpai dengan menerapkan keuangan inklusif syariah (*Sharia Financial Inclusion*).
- Persamaan :**
- Objek peneliti yaitu Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
- Perbedaan :**
- Penelitian Edi Susilo (2015) Menggunakan analisis deskriptif, menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik pemberdayaan umat melalui inklusi keuangan syariah (*sharia financial inclusion*) dalam pengentasan kemiskinan dan kebodohan. Berbeda dengan penelitian ini yang melihat pengaruh inklusi keuangan terhadap kemiskinan.

I. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian dan variabel penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan mengenai keuangan inklusif, Keuangan Syariah, kerangka pemikiran.

BAB III Metode penelitian

Bab ini memnjelaskan tentang desain penelitian yang digunakan, yang mencakup jenis penelitian, pelaksanaan penelitian, lokasi penelitian, metode penelitian, sampel dan populasi dan teknik analisis data

BAB IV Pembahasan

Bab ini berisi pengolahan dan analisis data sekunder untuk selanjutnya temuan dibahas guna menjawab tujuan penelitian.

BAB V Penutup

Bagian ini merupakan bab terkahir yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran serta implikasi dari hasil penelitian.